



**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**KAJIAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESANTREN  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**LEMBAGA STUDI AGAMA DAN SOSIAL (LSAS)  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
2013**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Sebagai provinsi yang mempunyai lebih dari 5000 pondok pesantren<sup>1</sup> dan 1.169.256 santri, Jawa Timur jelas mempunyai karakteristik dan modal sosial tersendiri dalam melakukan proses pembangunan. Secara sosio-historis, perjalanan panjang pesantren setidaknya telah menunjukkan realitas tersebut, yakni pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga sosial kemasyarakatan (Amin Haidari 2005).

Hal serupa juga diungkapkan oleh M.M Bilah (1985; 293). Baginya, pesantren memiliki dua fungsi dasar dalam proses pembangunan nasional. *Pertama*, kemampuan sebagai *centre of excellence* untuk *penggemblengan* bagi pemikir agama (*religious intellectual*). fungsi ini memaksa pesantren untuk berkembang menjadi pusat studi keagamaan dan kemasyarakatan. *Kedua*, pesantren berfungsi sebagai *agent of development* yang menangani pembinaan pemimpin masyarakat (*community leader*) yang menuntut pesantren menjadi pionir dalam program-program pengembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pada titik ini, pesantren telah menahbiskan diri sebagai institusi pendidikan, dakwah sekaligus lembaga social.

Secara kultural, karakteristik masyarakat pesantren yang bercirikan patron-klien termasuk menjadi salah alasan mengapa mereka menjadi modal social pembangunan. Pola hubungan patron-klien dalam pesantren, mengantarkan kiai menempati hirarkhi tertinggi dalam stratifikasi sosial di pesantren, sedangkan santri sebagai klien yang selalu tergantung dengan patronase kiai. Perilaku kiai sehari-hari tidak hanya dapat dimaknai sebagai aktifitas manusia semata-mata yang dapat salah atau keliru, namun dapat bermakna sebagai implementasi dari “kepentingan suci” agama yang termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk hubungan semacam ini mampu membentuk terciptanya basis massa dengan militansi tinggi untuk membela kepentingan pesantren, atau lebih sederhana dapat juga disebut membela kepentingan kiai.

---

<sup>1</sup> Data dari Bagian Perencanaan dan Data, Setditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama R.I 2008-2009.

Clifford Geertz, dalam *The Javanese Kijaji: the Changing roles of a cultural broker* (1960) menyebut kiai sebagai “makelar budaya” (*cultural brokers*). Hasil obyektifikasi di Mojokuto Pare, Kediri Jawa Timur yang dilakukan Geertz ini menganggap bahwa kiai bertindak menghubungkan pesantren dan budaya luar. Sebagai “makelar”, ia berhak menyaring unsur budaya yang boleh masuk atau tidak. Dalam keadaan demikian kiai akan kehilangan fungsinya sebagai perantara dalam arus perubahan masyarakat yang berlangsung cepat. Kiai kehilangan perannya tersebut, lalu hanya menjalankan posisi sekunder dan tak lagi kreatif.

Dalam konsep yang berbeda, Hiroko Horikoshi (1987) yang meneliti peran ajengan di Garut Jawa Barat mengembangkan konsep Geertz tersebut. Menurutnya, kiai tidak lagi berpretensi dalam posisi makelar budaya, namun Horikoshi menempatkan kiai sebagai *enterpreuner* yang dengan kreatif melakukan gerak transformasi sosial. Ia menunjukkan bahwa kiai tidak berpretensi meredam gejolak perubahan yang terjadi, melainkan dengan kreatif memelopori perubahan sosial yang terjadi. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, tetapi menawarkan agenda perubahan nyata yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Seturut dengan pandangan tersebut, dalam konteks perjalanan demokrasi-politik di Indonesia, beberapa ahli cukup *gamblang* secara kualitatif mendeskripsikan peran pesantren dan santrinya dalam pergulatan proses demokratisasi. Diantaranya adalah Martin Van Bruinessen dalam bukunya *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (2012) dan *NU; Tradisi, Relasi-Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (1994). Bruinessen dalam kedua karyanya tersebut menjelaskan bagaimana kaum pesantren melakukan rekonstruksi wacana keagamaan dalam proses menyelesaikan problem social-agama, ekonomi dan politik di tanah air pada tahun 1990an. Pula Andree Feillard dalam karyanya *NU Vis-a-Vis Negara* (1999), Muhammad AS Hikam ‘*Nahdlatul Ulama, Civil Society dan Proyek Pencerahan*’ (1999), Lukman Hakim dalam buku ‘*Perlawanan Islam Kultural*’ (2004), dan sebagainya.

Namun demikian, disisi lain realitas politik Indonesia juga menampilkan wajah minor dalam memaknai peran komunitas pesantren. Bagi kebanyakan politisi baik nasional maupun regional sering menjadikan kiai, keluarga pesantren, tokoh pesantren dan santri sebagai lahan sasaran dalam membangun basis kepentingan politiknya. Pada

tiga periode pemilihan umum nasional tahun 1999, 2004 dan 2008, bukan partai-partai politik berbasis ideologi Islam –seperti PPP- saja yang berebut pengaruh di kalangan kiai dan pesantren, melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis, seperti Golkar dan PDIP. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan komunitas Islam yang menjadi pengikut setia kiai, kedua partai politik tersebut menempatkan beberapa kiai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus teras partainya serta menempatkan mereka pada posisi “calon jadi” dalam Pemilu. Bahkan dalam pemilu tahun 1992 dan 1997 sebelum bergulirnya reformasi, ada sekian banyak fakta yang menunjukkan kedekatan tokoh pesantren pada partai yang tidak berazaskan Islam. Hal ini dapat dilihat dari kedatangan Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut;  *baca*) sebagai tokoh Golkar dan Megawati sebagai tokoh PDIP ke kantong-kantong massa NU di Jawa Timur dengan diantar Gus Dur yang menjadi Ketua Umum PBNU.

Bentuk perilaku politik seperti diatas, satu sisi memperluas akses politik kalangan muslim tradisional dan sedikit banyak juga memberikan perluasan pengaruh Islam pada berbagai kelompok politik, sebagaimana ditandai dengan munculnya sayap Islam dalam PDIP. Disisi lain, situasi tersebut juga melahirkan fragmentasi politik yang unik di kalangan umat Islam sendiri, berupa terulangnya oportunisme politik di kalangan tokoh-tokoh politik Islam sebagaimana pengalaman era 1950-an. Pergulatan politik antar tokoh Islam sendiri memperlihatkan kuatnya oportunisme di kalangan politisi muslim. Perbedaan afiliasi politik menjadikan mereka nyaris tidak pernah satu suara dalam menyikapi berbagai persoalan politik.

Pluralitas keislaman di Indonesia menjadikan setiap kelompok keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis pendukung tegaknya setiap kepentingan politik. Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan partai-partai politik Islam secara kuantitatif untuk memperebutkan pengaruh pada lahan politik yang sama. Keterwakilan umat Islam bukan lagi dalam kapasitas perbedaan *platform* ideologis atau bermakna pembelaan kepentingan umat Islam. Dalam konteks ini, pragmatisme politik praktis bahkan cenderung menjadi lebih menonjol dibanding pembelaan kepentingan komunitas dan agama.

Di kalangan muslim tradisional seperti Nahdlatul Ulama, dimana kiai dan tokoh pesantren menjadi pilar kultural utamanya, muncul beberapa partai politik yang

masing-masing mengklaim sebagai representasi politik komunitas ini. Masing-masing juga berupaya menempatkan beberapa kiai dan tokoh pesantren sebagai motor penggerak ataupun sekedar legitimasi.

Pada masa Orde Baru, posisi kiai dalam kancah politik nasional semakin terpinggirkan, bahkan tidak jarang dicurigai pemerintah, meskipun demikian para kiai tetap eksis dengan perjuangan dan pilihan politiknya. Sebagai contoh dapat dilihat, pada saat kampanye pemilu 1977, kiai Bisyrri Syamsuri dengan kapasitasnya sebagai kiai NU dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, mengeluarkan “fatwa politik”, bahwa setiap muslim diharuskan memilih PPP<sup>2</sup>. Sikap “radikal” Kiai Bisyrri kembali ditunjukkan pada Sidang Umum MPR tahun 1978 dengan melakukan *walk out* yang kemudian diikuti oleh semua anggota DPR/MPR dari PPP, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang memberi tempat terhormat pada aliran kepercayaan. Dalam perspektif teori politik, tindakan para kiai tersebut merupakan *counters-hegemoni*<sup>3</sup>. Akibatnya, sejak periode Pemilu Pasca Orde Baru afiliasi politik para kiai dan tokoh pesantren terpecah ke dalam beberapa partai NU. Perpecahan internal yang muncul kemudian juga senantiasa dilegitimasi dengan dukungan dan restu sekelompok kiai tertentu.

Orientasi politik NU sebagai organisasi para kiai dari kalangan Islam tradisional, termasuk dalam kelompok akomodasionis<sup>4</sup>. Meski demikian, dalam berpolitik, sebagian kiai NU terkadang juga menempuh strategi politik militan, tergantung dari kondisi yang dihadapi. Namun secara umum, pandangan politik kiai dan NU lebih bersifat akomodatif<sup>5</sup>. Sementara itu, dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam, kiai NU menggunakan substansi daripada cara-cara radikal dan konfrontatif. Pendekatan ini lebih menekankan terjadinya keselarasan dan keharmonisan dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan. Sikap yang demikian ini yang menyebabkan kiai dan NU, oleh sementara orang dituduh sebagai sikap

---

<sup>2</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 234

<sup>3</sup> Van <sup>Martin</sup> Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 105-106.

<sup>4</sup> Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indoensia*, (Jakarta: Paramadina, 1998) h. 42

<sup>5</sup> John Gregory Fealy, *Ulama and Politic in Indoensia A History of Nahdlatul Ulama*. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departemen of History. (Monash University, 1998) h. 225

oportunis<sup>6</sup>; yaitu sebuah motivasi utama politik kiai dan NU dalam merebut materi dan status (kekuasaan). Hal ini dapat dilihat ketika di satu pihak NU bergabung dengan golongan nasionalis untuk melawan Masyumi dan dukungannya terhadap kabinet parlementer, namun pada saat yang sama juga mendukung untuk kembali pada UUD 1945<sup>7</sup>.

Kecenderungan tersebut tampaknya juga terjadi pada arena politik lokal atau daerah. Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kiai dan tokoh pesantren banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, bupati maupun gubernur, juga tak henti berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. Terbelahnya dukungan politik kiai tak terhindarkan lagi dalam meloloskan calon tertentu dalam proses Pilkada. Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan masing-masing calon meraih dukungan kiai atau tokoh-tokoh pesantren menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kiai terbelah kepada beberapa calon berbeda.

Kecenderungan tarik menarik dukungan kiai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan atau pun sekedar legitimasi bagi kepentingan politik masih cukup tinggi. Komunitas elite keagamaan ini masih dipercaya mampu memberikan sumbangan signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun perorangan. Padahal terbelahnya afiliasi politik kiai pada politik partisan tentunya menimbulkan persoalan berkenaan dengan sikap kaum santri yang sebelumnya dikenal memiliki respekasi dan ketaatan tinggi pada kiai.

Dalam realitas demikian itu, kiai berada dalam dua posisi yang kontradiktif<sup>8</sup>. Sebagai elit politik, sesuai dengan paham *sunni*, kiai wajib mentaati pemerintah. Sebagai elit agama, kiai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan cara *amar makruf nahi mungkar*. Pada saat yang sama, kiai sebagai

---

<sup>6</sup> Van Martin Bruinessen, *NU Tradisi relasi-relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

<sup>7</sup> John Gregory Fealy, *Ulama and Politic in Indonesia A History of Nahdlatul Ulama*. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departement of History. (Monash University, 1998), h. 189

<sup>8</sup> John Gregory Fealy, *Ulama and Politic in Indoensia A History of Nahdlatul Ulama*. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departement of History. (Monash University, 1998), h. 277

interpreteter ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi referensi. Sebagai elite sosial, kiai menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Multi peran seperti inilah yang seringkali menjadikan kiai bersikap serba salah dan dilematis. Peran dan tanggung jawab kiai terhadap agama, Negara dan masyarakat secara bersamaan, tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan yang menjadikan pada posisi sulit.

Perbedaan afiliasi politik kiai juga bukan mustahil menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kiai sebagai *opinion leader* ataupun referensi utama pengambilan keputusan yang harus ditaati. Situasi ini potensial menjadikan kiai dalam konotasi dan lingkup pengaruh kulturalnya yang khas, sebagaimana identifikasi Mastuhu, Zamakhsyari Dlofir ataupun Bruinessen, berubah dari sebelumnya. Bahkan bukan mustahil sebagian kiai telah kehilangan respektasinya karena perbedaan sikap politik. Apalagi sudah jamak diketahui bahwa dalam beberapa kasus afiliasi politik kiai seringkali disertai dengan fasilitas tertentu yang lebih banyak dinikmati kiai dan keluarganya, sementara manfaat yang sama kurang dinikmati para pengikutnya.

Tema penelitian ini menjadi menarik diangkat mengingat beberapa indikator keterlibatan kiai dan kalangan pesantren mulai nampak dalam pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur . Pula semenjak era reformasi bergulir, terjadi mobiltas sosial kaum santri baik pada level pendidikan, politik, dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya perubahan pola partisipasi masyarakat pesantren dari masa-masa sebelumnya. Lebih lanjut, diketahui bahwa provinsi Jawa Timur merupakan parameter utama tradisi kultural pesantren dengan segala ciri khasnya. *Nah*, disinilah rasional pentingnya penelitian ini dilakukan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kecenderungan perilaku politik masyarakat pesantren dalam pemilihan kepala daerah (gubernur) di Jawa Timur?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi motivasi untuk menentukan pilihan politik santri dalam Pilgub Jawa Timur?

3. Bagaimana pola konfigurasi perilaku politik santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengukur peran dan partisipasi politik masyarakat pesantren pada pemilihan kepala daerah (gubernur).
- b. memahami faktor-faktor yang menjadi motivasi untuk menentukan pilihan politik santri dalam pilihan kepala daerah Jawa Timur.
- c. Memetakan konfigurasi perilaku politik masyarakat pesantren pada pemilihan kepala daerah (gubernur) di Provinsi Jawa Timur
- d. Memetakan figur ideal pemimpin Provinsi Jawa Timur pada pemilihan pemilihan kepala daerah (gubernur ) di Provinsi Jawa Timur

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dampak hasil kajian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni secara teorik dan praktis

- Secara Teoritik

Hasil penelitian ini akan membantu menjelaskan signifikansi pergeseran posisi kiai dan tokoh pesantren di tengah perubahan sosial dan politik masyarakat Islam tradisional.
- Secara Praktis
  - a. Penelitian ini akan membantu menjelaskan konfigurasi partisipasi politik santri dalam pemilihan gubernur 2013.
  - b. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Gubernur Jatim dalam menentukan program pemberdayaan bagi kalangan santri dan model diseminasinya.

### **1.5. Hasil yang Diharapkan**

Dari uraian diatas, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran secara objektif deskripsi peran dan partisipasi masyarakat pesantren dalam pemilihan Kepala Daerah (gubenur) di Provinsi Jawa Timur serta pengaruh program pemberdayaan berbasis



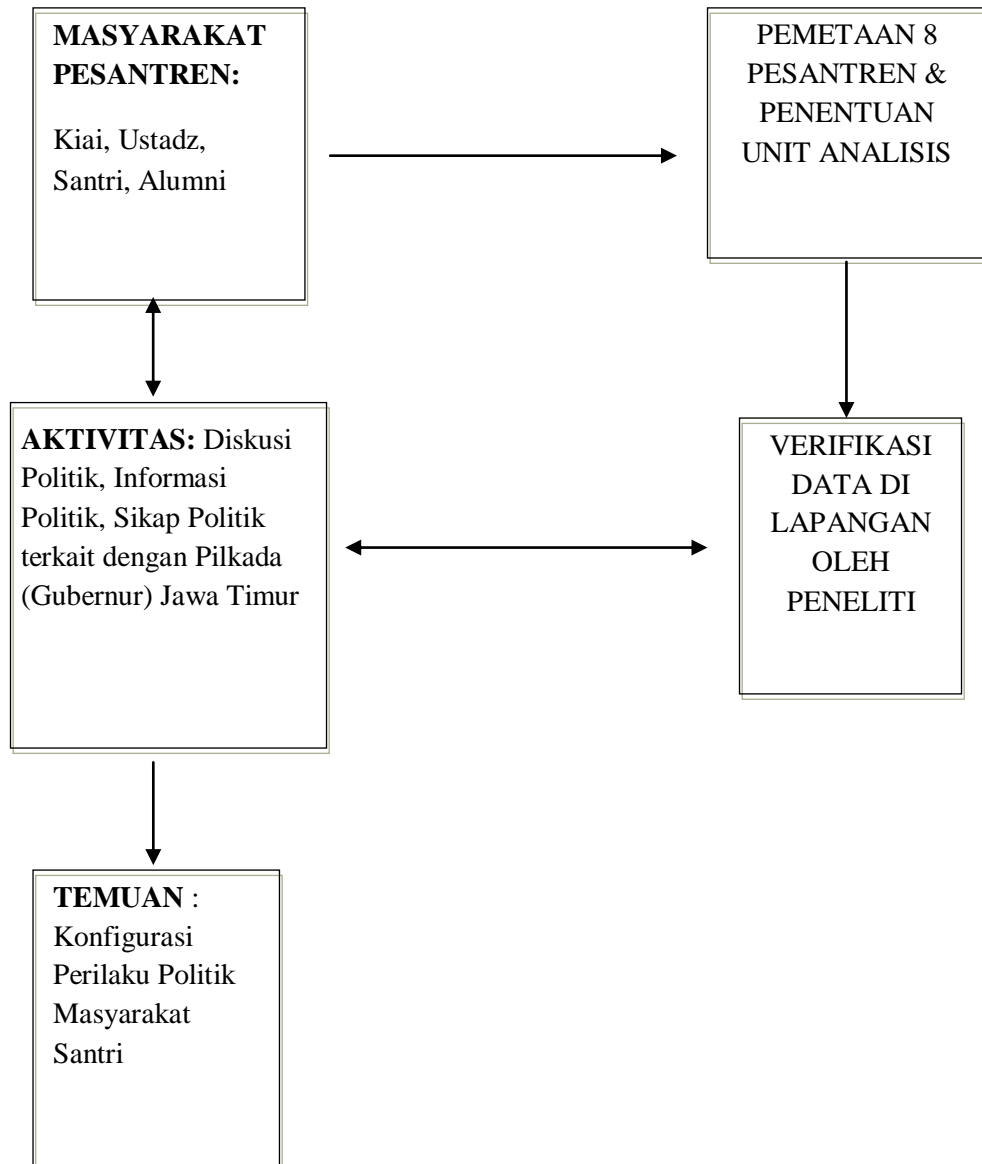
pesantren pada pilihan politik masyarakat pesantren di pemilihan kepala daerah (gubernur) Provinsi Jawa Timur.

### **1.6.Ruang Lingkup**

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Melakukan pemetaan pondok pesantren di Pasuruan, Lamongan dan Jombang yang akan diteliti
2. Penentuan masyarakat pondok pesantren yang akan menjadi unit analisis dari penelitian ini
3. Membuat indikator yang akan dijadikan acuan konseptual dalam studi tentang perilaku masyarakat pesantren dalam Pilkada (gubernur) Jawa Timur
4. Melakukan survei lapangan dengan menyebarkan kuesioner
5. Melakukan analisis ilmiah terhadap partisipasi politik masyarakat pesantren di Lamongan, Jombang dan Pasuruan
6. Melakukan interpretasi data yang sudah dikaji secara ilmiah

### 1.7.Kerangka Konsep



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritik Tentang Perilaku Politik**

Yang dimaksud dengan perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Ia adalah sebagai salah-satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik. Ramlan Surbakti ( 1992 : 131 ), mengemukakan bahwa perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Fadillah Putra, 2003 : 200 ). Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

## 2.2 Tinjauan Teoritik Tentang Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Fadillah Putra, 2003 : 201). *Mazhab Colombia* menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas ( status sosial ), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu, preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan (Gaffar, Affan, 1992 : 43 ).

Berbeda dengan Mazhab Colombia, bahwa mazhab Michigan menekankan pada faktor psikologis memilih artinya penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya yang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik. Sikap dan perilaku memilih ditentukan oleh idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, keinginan dan kehendak hati. Perilaku memilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu

### 2.2.1 Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan,

pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang.

#### *2.2.2 Pendekatan Psikologis.*

Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pilihan seseorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama dengan pilihan politik orang tuanya. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kepada kandidat.

#### *2.2.3 Pendekatan Rasional.*

Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih walikota yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon walikota dan wakil walikota akan melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada Pilkada.

Sedangkan dalam proses menentukan pilihan politik, masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor historis. nya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan

pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau.

Faktor kedua ialah kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strateginya dalam kampanye agar perilaku pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut.

Faktor ketiga ialah agama/keyakinan dan budaya. Dalam hal ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan agama dan budaya masyarakat baik itu kesukuan, etnisitas sampai ras. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dan pluralitas ataupun beraneka ragam. Agama telah memberikan nilai moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada etnis tionghoa yang dominan beragama Budha namun memang tidak semua etnis tionghoa beragama Budha. Keyakinan dan agama merupakan pedoman acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam proses politik. Hal ini membenarkan bahwa agama dan keyakinan dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam aktivitas politik.

Begitu pula halnya dengan Suku ataupun Etnisitas. Konsep etnisitas akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dalam kajian ini kita ketahui bahwa perilaku politik seseorang bisa saja dipengaruhi oleh ikatan-ikatan tertentu seperti rasa

keterikatan dalam etnisitas. Etnis tionghoa cenderung memilih dan memberikan pilihan mereka dalam pemilu kepada kandidat yang paling mengarah kepada faktor ini. Untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam mengapa faktor kesukuan ini sangat mempengaruhi dalam perilaku politik etnis tionghoa.

Faktor keempat ialah pendidikan dan komunikasi yang sangat berpengaruh kepada perilaku konstituen. Pendidikan dan komunikasi yang baik dari si calon maupun kandidat akan memberikan dan mempengaruhi simpatik konstituen. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadarannya politiknya, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maupun seseorang maka semakin rendah tingkat kesadarannya politiknya. Selain itu, komunikasi politik yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam aktivitas politiknya dan perilaku politiknya dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

### **2.3 Perilaku Politik Santri: Sebuah Kajian Terdahulu**

Untuk memahami fenomena partisipasi politik di kalangan masyarakat pesantren, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu definisi partisipasi politik. Dalam pengertian yang diberikan oleh Verba and Nie (1972) partisipasi politik (*political participation*) merupakan aktifitas yang dilakukan warga yang sedikit banyak ditujukan langsung untuk memengaruhi seleksi anggota pemerintahan atau tindakan yang mereka lakukan: “*activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take.*”

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh sejumlah ahli, setidaknya ada empat konsep dasar yang terkait dengan partisipasi politik yakni aktivitas, warga negara biasa (*ordinary citizens*), politik, dan pengaruh (Brady 1999).

Aksi atau aktifitas dalam partisipasi politik adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang. Menurut (Brady 1999) hal ini tidak cukup hanya berupa pikiran, sikap atau kecenderungan. Misalnya, perasaan dekat dengan partai politik tertentu atau tidak menyukai kebijakan pemerintah bukanlah sebagai aktivitas, maka hal itu tidak dianggap sebagai partisipasi politik. Sedangkan voting untuk partai, penandatanganan petisi untuk menunjukkan ketidaksepakatan atas kebijakan pemerintah bisa dianggap sebagai aktivitas atau partisipasi politik. participation. Selain itu, beberapa ahli juga memasukkan diskusi politik dan mengikuti berita politik di media massa termasuk partisipasi politik (Conway 2000, 3).

Selain itu, partisipasi politik juga dilakukan oleh *ordinary citizens*, bukan para elit pemerintah. Aktifitas yang dilakukan oleh elit pemerintah adalah politis, dan bukan partisipasi politik (Brady 1999). Aktifitas yang dilakukan oleh aktifitas asosiasi social seperti jamaah gereja, klub olahraga, kelompok budaya , atau bahkan individu bukanlah politik sebab hal itu diarahkan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, partisipasi politik dilakukan secara sukarela "*political participation is a voluntary act, meaning that the participants are not forced to do it and are not paid for it*" (Verba, Schlozman, and Brady 1995, 38-9 dikutip dari Mujani 2003: 279).

Kaase and Marsh (1979) menyatakan bahwa partisipasi politik terdiri dari dua bentuk yang berbeda, yakni konvensional dan tidak konvensional. Bentuk konvensional meliputi setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat biasa (*ordinary citizens*) untuk memengaruhi hasil politik terkait seperti *voting* dan kampanye.

Sedangkan bentuk yang tidak konvensional adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat biasa (*ordinary citizens*) untuk memengaruhi hasil politik yang tidak berhubungan dengan norma dan undang-undang yang mengatur partisipasi politik di bawah sebuah regim, seperti demonstrasi, atau perusakan fasilitas publik.



Dalam kerangka pemahaman tersebut, penelitian ini, partisipasi politik yang akan diukur adalah aktivitas masyarakat pesantren yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur.

#### **2.4 Perilaku Politik Masyarakat Pesantren**

Dalam beberapa kajian teoritis, perilaku politik masyarakat menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Secara sosiologis, seseorang yang berlatar-belakang pendidikan tinggi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mereka yang berpendidikan rendah dalam menentukan pilihan politiknya. Kaum perempuan juga dianggap mempunyai perilaku memilih yang berbeda dengan kaum lelaki. Pula kelompok agama tertentu dengan preferensi nilai atau ajaran yang dipegangnya juga dianggap mempunyai pengaruh yang penting dalam membentuk perilaku memilih mereka yang berbeda dengan lainnya saat memilih calon presiden, anggota legislatif, gubernur, bupati hingga kepala desa.

Dalam konteks perilaku politik dan memilih masyarakat pesantren dalam berbagai kajian yang terdahulu menunjukkan karakteristik unik dan berbeda. Paradigma tradisional tentang relasi kiai dan santri sebagai komunitas yang dinamis membentuk subkultur yang terbangun secara eksklusif, fanatis dan esoteris.

Meminjam identifikasi Geertz, kiai dan santri merupakan bagian dari kelompok masyarakat Islam khususnya di pulau Jawa yang memiliki kesadaran keislaman yang lebih utuh dan lurus dibanding dua kelompok lainnya, *abangan* dan *priyayi*. Komunitas santri sendiri diidentifikasi Geertz merupakan bentukan komunitas kiai, khususnya melalui lembaga pesantrennya<sup>9</sup>. Meski lekat dengan tradisi-tradisi mistik asketik khas Hindu Jawa mereka termasuk sekelompok Islam yang taat dalam menjalankan syari'at Islam.

---

<sup>9</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Politik Santri*, (Yogyakarta: Rinneka SIPRESS, 1992), h. 1

Sistem budaya tersebut pada dasarnya merupakan pelembagaan tradisi yang membentuk struktur khas. Basis massa komunitas kiai dan santri bertumpu pada pesantren dan pedesaan dimana kiai menempati posisi sentral dalam perikehidupan sosialnya. Hal ini menjadikan kepemimpinan kiai dikalangan masyarakat santri sejak awalnya mengakar secara kultural. Kiai merupakan kelompok elite secara kultural, sosial, politik maupun ekonomi. Secara kultural, kiai memiliki kedekatan hubungan genealogis dengan tokoh-tokoh masa lalu yang diakui kredibilitas pribadinya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan sebutan yang diberikan masyarakat kepada kiai dan keturunannya. Di Jawa Timur tokoh agama pemimpin pesantren tradisional biasa disebut kiai, anak-anak kiai biasa disebut *gus*. Sebutan ini merupakan gelar (*kunyah*) kultural yang diberikan masyarakat kepada seorang kiai dan keluarganya.

Dalam kehidupan sosial, kiai menjadi panutan ditengah masyarakatnya, walaupun ada pemimpin formal yang mendapatkan status dan kedudukannya dari lembaga pemerintahan. Status informal ini diberikan karena tingginya kualitas tauladan tingkah laku yang mampu dicontohkan kiai pada masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dari kacamata politik, kiai memiliki basis massa riil di pesantren dan masyarakat sekitarnya. Basis massa semacam ini memiliki militansi tinggi untuk membela kepentingan kiai dan pesantren. Hal ini memberikan *bargaining position* yang cukup vital pada kiai dalam kehidupan politik lokal, bahkan nasional. Dalam ekonomi, kiai memiliki kekayaan yang dimilikinya. Mereka merupakan pengajar agama (*preacher*) yang rata-rata sekaligus pemilik tanah yang luas<sup>10</sup>.

Kiai merupakan pemimpin kultural yang fleksibel dalam menghadapi tradisi lokal. Menurut Geertz, fleksibilitas tersebut diakibatkan oleh pandangan mereka yang

---

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dlofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 56

realistik mengenai apa yang sebenarnya bersifat Islam dan bukan. Kalaupun bukan termasuk ajaran Islam, mereka mampu menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak membahayakan untuk dilakukan ataupun merusak keagamaan masyarakat muslim. Fleksibilitas kiai ini muncul dari pemahaman keagamaan individual yang dimilikinya dengan ditunjang oleh penguasaan ilmu-ilmu agama seperti *ushu al fiqh*, *ilmu kalam*, *tasawuf*, dan sebagainya. Kekayaan intelektual yang dimiliki kiai ditopang oleh kemampuan kiai dalam memahami pesan teks agama dan realitas dinamis dari masyarakat sekelilingnya, sehingga antara keduanya (teks agama dan dinamika masyarakat) dapat didialogkan tanpa melakukan determinasi terhadap salah satunya. Diantara fenomena budaya menonjol dalam hal ini tampak pada “islamisasi” tradisi *slametan* yang lebih menonjolkan unsur islamnya dibanding non-islam<sup>11</sup>. Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut bahkan sudah diterima sebagai bagian dari tradisi Islam, dimana kiai seringkali justru memiliki peran sentral dalam pelaksanaannya. Wujud keberhasilan kiai dalam mendialogkan teks agama dengan realitas yang sedang berjalan adalah fenomena *tahlilan*, *nyadran*, *khaul*, *suroan*, *manakiban*, *sema'an* al Qur'an, dan *riyayan*.

Pada banyak kasus, peran kiai dalam masyarakat pedesaan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan semata, dalam arti yang sempit seperti shalat, puasa, zakat dan berhaji. Namun kiai juga memasuki ruang sosial dan budaya, bahkan pada ruang privat yang bersifat individual<sup>12</sup>. Di tengah kebudayaan yang didominasi ketokohan kiai, berbagai masalah sehari-hari menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan pengobatan sering menempatkan kiai sebagai tumpuan. Masyarakat Islam di sekitar kiai dengan sendirinya akan

---

<sup>11</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 209

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 53

senantiasa berusaha menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan kiai. Kiai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan keputusannya dibanding tokoh manapun.

Status kiai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh pekerjaan sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi dan masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung dominan secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar pendapatnya dibanding aparat pemerintahan, seperti lurah atau kepala desa<sup>13</sup>.

Persoalannya pada generasi kiai era belakangan, status yang demikian tampak mulai memudar. Kiai yang demikian memang banyak dijumpai era 1950-an sampai dengan 1980-an. Namun demikian, pada generasi sesudahnya semakin banyak kiai yang tidak mewarisi penuh pola pikir, posisi sosial, kultural maupun keahlian leluhurnya. Beberapa kiai dan tokoh pesantren memang masih mewarisi wibawa pendahulunya, tetapi tampaknya tidak demikian pada sebagian besar.

Perluasan sektor perekemonian di kalangan masyarakat muslim menjadikan ketergantungan ekonomi mereka pada kiai melemah. Rasionalitas berfikir mereka juga menjadikan peran kiai dalam penyelesaian masalah-masalah rumah tangga, perjodohan serta pengobatan berkurang drastis, meski bukan berarti hilang sama sekali. Situasi ini sedikit demi sedikit banyak menjadikan relasi kiai-santri semakin berjarak dibanding masa-masa sebelumnya. Kiai masih diperlukan dalam acara-acara seremonial, seperti hajatan dan forum-forum pengajian, tetapi bukan dalam kapasitas sebagai pengendali dan pengarah seremoni sebagaimana dimasa lalu. Peningkatan perekonomian masyarakat yang sebagian sangat mungkin telah melampaui status sosial ekonomi kiai kurun waktu belakangan menjadikan relasi tersebut menjadi semakin formalistik. Kiai

---

<sup>13</sup> Hiroko dan Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), h. 193

memang masih diperlukan dalam masalah-masalah tertentu, tetapi bukan lagi segala-galanya.

Perkembangan pelembagaan sebagian pesantren besar pada kurun mutakhir juga memperlihatkan kecenderungan pemisahan institusi ini dari lingkungan sekitarnya. Bila sebelumnya kiai secara independen menjadi pihak yang menghidupi pesantren, dalam perkembangannya mereka melibatkan masyarakat luas dalam penggalangan dananya. Tuntutan pengembangan lembaga menjadikan kemampuan kiai secara sendirian tidak lagi memadai untuk menopang tegaknya lembaga yang dikelola. Belajar di pesantren yang sebelumnya sekaligus merupakan satu bentuk pengabdian, bekerja pada kiai dengan imbalan kesempatan belajar agama di pesantren berubah kearah kontrak kerja yang semakin rasional karena persyaratan administratif dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh santri sendiri. Perkembangan ini tentunya tidak dapat diabaikan pengaruhnya terhadap perubahan pola relasi kiai dan santri yang semestinya tidak dapat lagi dipahami dalam konteks hubungan sebagaimana idealitas penggambaran para pengkaji kiai dan pesantren pada masa sebelumnya.

Keterlibatan sebagian kiai, tokoh pesantren dan para mantan santri dalam partai politik juga tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan politik antara kiai dan santri yang secara kebetulan berada pada kelompok politik berbeda. Paling tidak, perbedaan afiliasi dan sepak-terjang politik kiai dan tokoh pesantren tampak telah menimbulkan beragam apresiasi, baik dalam rupa respon yang apresiatif, sinis atau sekedar pasif. Keterlibatan kiai dalam satu kepentingan politik, termasuk dukungannya terhadap calon tertentu dalam pemilihan umum, kepala Negara ataupun kepala daerah bukan referensi umum kalangan santri. Kalau pun masih ada sebagian yang masih menempatkan kiai sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau sikap politik, dapat dipastikan hal itu menuntut kondisi-kondisi tertentu.

Dari sini kiranya dapat diajukan dugaan bahwa calon gubernur yang didukung kiai akan potensial didukung oleh kalangan santri dengan sikap politik yang secara signifikan selaras dengan sikap politik kiai. Meski pergeseran situasi politik dan variable sosial lain yang berkembang di kalangan kiai dan santri sangat mungkin turut mempengaruhi signifikansi tersebut terganggu dalam tingkatan tertentu, namun sampai pada pemilihan gubenur Jawa Timur signifikansi tersebut tetap berada pada level berpengaruh. Sedangkan disisi lain dapat dinyatakan bahwa calon gubernur yang didukung kiai secara signifikan tidak mempengaruhi sikap politik kaum santri. Hal ini dimungkinkan jika perubahan situasi politik menjadikan relasi kiai-santri sudah mengalami perubahan dibanding sebelumnya.

Ada Penjelasan mengenai posisi dan pengaruh kiai terhadap kaum santri sudah cukup banyak dikaji para pemerhati Islam kultural di Indonesia, mulai dari deskripsi umum mengenai kultural keagamaan (Islam) khas masyarakat Jawa, seperti Geertz hingga relasi yang dipetakan para peneliti belakangan seperti Feilaard dan Barton, hingga penelitian paling mutakhir, deskripsi relasi kiai-santri tampak masih belum berubah dibanding paparan Mastuhu dan Dlofier.

Meminjam identifikasi Geertz, kiai dan santri merupakan bagian dari kelompok masyarakat Islam khususnya di pulau Jawa yang memiliki kesadaran keislaman yang lebih utuh dan lurus dibanding dua kelompok lainnya, *abangan* dan *priyayi*. Komunitas santri sendiri diidentifikasi Geertz merupakan bentukan komunitas kiai, khususnya melalui lembaga pesantrennya<sup>14</sup>. Meski lekat dengan tradisi-tradisi mistik asketik khas Hindu Jawa mereka termasuk sekelompok Islam yang taat dalam menjalankan syari'at Islam.

---

<sup>14</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Politik Santri*, (Yogyakarta: Rinneka SIPRESS, 1992), h. 1

Antara kiai dan santri terdapat sebuah pola relasi emosional layaknya tradisi feodal, tetapi tanpa struktur dan tingkatan politis yang sofistikatif seperti galibnya tradisi serupa dalam pemerintahan kerajaan. Kiai dan keluarganya memiliki posisi sosial dan kultural yang tinggi dibanding kebanyakan kaum santri. Menurut Irsan sebagaimana diungkap Marijan, tradisi tersebut bertumpu pada tiga pilar utama<sup>15</sup>. Pilar-pilar tersebut terdiri dari basis massa yang merupakan pola struktur sosialnya, basis ulama yang merepresentasikan struktur kepemimpinan serta basis tradisi yang secara kultural menjadi semacam sistem budaya yang mengikat visi kelimuan maupun berbagai etiket keislaman yang mereka anut.

Sistem budaya tersebut pada dasarnya merupakan pelembagaan tradisi yang membentuk struktur khas. Basis massa komunitas kiai dan santri bertumpu pada pesantren dan pedesaan dimana kiai menempati posisi sentral dalam perikehidupan sosialnya. Hal ini menjadikan kepemimpinan kiai dikalangan masyarakat santri sejak awalnya mengakar secara kultural. Kiai merupakan kelompok elite secara kultural, sosial, politik maupun ekonomi. Secara kultural, kiai memiliki kedekatan hubungan genealogis dengan tokoh-tokoh masa lalu yang diakui kredibilitas pribadinya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan sebutan yang diberikan masyarakat kepada kiai dan keturunannya. Di Jawa Timur tokoh agama pemimpin pesantren tradisional biasa disebut kiai, anak-anak kiai biasa disebut *gus*. Sebutan ini merupakan gelar (*kunyah*) kultural yang diberikan masyarakat kepada seorang kiai dan keluarganya.

Dalam kehidupan sosial, kiai menjadi panutan di tengah masyarakatnya, walaupun ada pemimpin formal yang mendapatkan status dan kedudukannya dari lembaga pemerintahan. Status informal ini diberikan karena tingginya kualitas tauladan tingkah

---

<sup>15</sup> Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, (Surabaya: Erlangga, 1992), h. 28

laku yang mampu dicontohkan kiai pada masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dari kacamata politik, kiai memiliki basis massa riil di pesantren dan masyarakat sekitarnya. Basis massa semacam ini memiliki militansi tinggi untuk membela kepentingan kiai dan pesantren. Hal ini memberikan *bargaining position* yang cukup vital pada kiai dalam kehidupan politik lokal, bahkan nasional. Dalam ekonomi, kiai memiliki kekayaan yang dimilikinya. Mereka merupakan pengajar agama (*preacher*) yang rata-rata sekaligus pemilik tanah yang luas<sup>16</sup>.

Kiai merupakan pemimpin kultural yang fleksibel dalam menghadapi tradisi lokal. Menurut Geertz, fleksibilitas tersebut diakibatkan oleh pandangan mereka yang realistik mengenai apa yang sebenarnya bersifat Islam. Kalaupun bukan termasuk ajaran Islam, mereka mampu menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak membahayakan untuk dilakukan ataupun merusak keagamaan masyarakat muslim. Fleksibilitas kiai ini muncul dari pemahaman keagamaan individual yang dimilikinya dengan ditunjang oleh penguasaan ilmu-ilmu agama seperti *ushu al fiqh*, *ilmu kalam*, *tasawuf*, dan sebagainya. Kekayaan intelektual yang dimiliki kiai ditopang oleh kemampuan kiai dalam memahami pesan teks agama dan realitas dinamis dari masyarakat sekelilingnya, sehingga antara keduanya (teks agama dan dinamika masyarakat) dapat didialogkan tanpa melakukan determinasi terhadap salah satunya. Diantara fenomena budaya menonjol dalam hal ini tampak pada “islamisasi” tradisi *slametan* yang lebih menonjolkan unsur islamnya dibanding non-islam<sup>17</sup>. Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut bahkan sudah diterima sebagai bagian dari tradisi Islam, dimana kiai seringkali justru memiliki peran sentral dalam pelaksanaannya. Wujud keberhasilan kiai dalam mendialogkan teks agama dengan realitas yang sedang

---

<sup>16</sup> Zamakhsyari Dlofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 56

<sup>17</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 209



berjalan adalah fenomena *tahlilan*, *nyadran*, *khaul*, *suroan*, *manakiban*, *sema'an* al Qur'an, dan *riyayan*.

Pada banyak kasus, peran kiai dalam masyarakat pedesaan tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan semata, dalam arti yang sempit seperti shalat, puasa, zakat dan berhaji. Namun kiai juga memasuki ruang sosial dan budaya, bahkan pada ruang privat yang bersifat individual<sup>18</sup>. Di tengah kebudayaan yang didominasi ketokohan kiai, berbagai masalah sehari-hari menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan pengobatan sering menempatkan kiai sebagai tumpuan. Masyarakat Islam di sekitar kiai dengan sendirinya akan senantiasa berusaha menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan ketokohan kiai. Kiai menjadi pemimpin informal yang lebih didengar petuah dan keputusannya dibanding tokoh manapun.

Status kiai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh pekerjaan sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi dan masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung dominan secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar pendapatnya dibanding aparat pemerintahan, seperti lurah atau kepala desa<sup>19</sup>.

Persoalannya pada generasi kiai era belakangan, status yang demikian tampak mulai memudar. Kiai yang demikian memang banyak dijumpai era 1950-an sampai dengan 1980-an. Namun demikian, pada generasi sesudahnya semakin banyak kiai yang tidak mewarisi penuh pola pikir, posisi sosial, kultural maupun keahlian leluhurnya. Beberapa kiai dan tokoh pesantren memang masih mewarisi wibawa pendahulunya, tetapi tampaknya tidak demikian pada sebagian besar.

---

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 53

<sup>19</sup> Hiroko dan Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), h. 193

Perluasan sektor perekemonian di kalangan masyarakat muslim menjadikan ketergantungan ekonomi mereka pada kiai melemah. Rasionalitas berfikir mereka juga menjadikan peran kiai dalam penyelesaian masalah-masalah rumah tangga, perjodohan serta pengobatan berkurang drastis, meski bukan berarti hilang sama sekali. Situasi ini sedikit demi sedikit banyak menjadikan relasi kiai-santri semakin berjarak dibanding masa-masa sebelumnya. Kiai masih diperlukan dalam acara-acara seremonial, seperti hajatan dan forum-forum pengajian, tetapi bukan dalam kapasitas sebagai pengendali dan pengarah seremoni sebagaimana dimasa lalu. Peningkatan perekonomian masyarakat yang sebagian sangat mungkin telah melampaui status sosial ekonomi kiai kurun waktu belakangan menjadikan relasi tersebut menjadi semakin formalistik. Kiai memang masih diperlukan dalam masalah-masalah tertentu, tetapi bukan lagi segala-galanya.

Perkembangan pelembagaan sebagian pesantren besar pada kurun mutakhir juga memperlihatkan kecenderungan pemisahan institusi ini dari lingkungan sekitarnya. Bila sebelumnya kiai secara independen menjadi pihak yang menghidupi pesantren, dalam perkembangannya mereka melibatkan masyarakat luas dalam penggalangan dananya. Tuntutan pengembangan lembaga menjadikan kemampuan kiai secara sendirian tidak lagi memadai untuk menopang tegaknya lembaga yang dikelola. Belajar di pesantren yang sebelumnya sekaligus merupakan satu bentuk pengabdian, bekerja pada kiai dengan imbalan kesempatan belajar agama di pesantren berubah kearah kontrak kerja yang semakin rasional karena persyaratan administratif dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh santri sendiri. Perkembangan ini tentunya tidak dapat diabaikan pengaruhnya terhadap perubahan pola relasi kiai dan santri yang semestinya tidak dapat lagi dipahami dalam konteks hubungan sebagaimana idealitas penggambaran para pengkaji kiai dan pesantren pada masa sebelumnya.

Keterlibatan sebagian kiai, tokoh pesantren dan para mantan santri dalam partai politik juga tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan politik antara kiai dan santri yang secara kebetulan berada pada kelompok politik berbeda. Paling tidak, perbedaan afiliasi dan sepak-terjang politik kiai dan tokoh pesantren tampak telah menimbulkan beragam apresiasi, baik dalam rupa respon yang apresiatif, sinis atau sekedar pasif. Keterlibatan kiai dalam satu kepentingan politik, termasuk dukungannya terhadap calon tertentu dalam pemilihan umum, kepala Negara ataupun kepala daerah bukan referensi umum kalangan santri. Walaupun masih ada sebagian yang masih menempatkan kiai sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau sikap politik, dapat dipastikan hal itu menuntut kondisi-kondisi tertentu.

Dari sini kiranya dapat diajukan dugaan bahwa calon gubernur yang didukung kiai akan potensial didukung oleh kalangan santri dengan sikap politik yang secara signifikan selaras dengan sikap politik kiai. Meski pergeseran situasi politik dan variable sosial lain yang berkembang di kalangan kiai dan santri sangat mungkin turut mempengaruhi signifikansi tersebut terganggu dalam tingkatan tertentu, namun sampai pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2008 signifikansi tersebut tetap berada pada level berpengaruh. Sedangkan disisi lain dapat dinyatakan bahwa calon gubernur yang didukung kiai secara signifikan tidak mempengaruhi sikap politik kaum santri. Hal ini dimungkinkan bilamana perubahan situasi politik menjadikan relasi kiai-santri sudah mengalami perubahan dibanding sebelumnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini, berdasarkan dari segi pengumpulan datanya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif-deskriptif dengan jenis survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>20</sup> Metode survey digunakan mendeskripsikan gejala perilaku politik santri di 8 pesantren di Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah secara kuantitatif.

#### 3.2. Variable dan Indikator

Tabel. 1  
Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	Pengetahuan politik santri	Pengetahuan cagub	Media kiai dlm politik	Luas kharisma kiai	Pengaruh politik kiai	Pilihan politik santri
I N D I K A T O R	Tahu/tidak ttg berita pilgub	Pengetahuan ttg cagub	Keterlibatan kiai dlm pilgub	Kiai paling berpengaruh	Pejabat bertamu	Ikutserta dlm coblosan pilgub
	Sumber informasi	Nama cagub	Tempat pembicaraan pilgub	Kiai paling disegani	Kiai yg getol bahas pilgub	Kewajiban mencoblos
	Kemenarikan berita pilgub	Sumber informasi cagub	Anjuran kiai utk pilgub	Alasan keberpengaruhan kiai	Kesamaan pilihan politik kiai	Kecocokan kriteria kiai dlm pilgub
	Ketertarikan pada kampanye	Kiai sbg sumber nama cagub	Fatwa pilihan politik dlm pilgub	Sebab pengaruh kiai	Kecenderungan mengikuti kiai dlm pilgub	Perasaan bersalah jk tdk mengikuti kiai dl pilgub
	Model kampanye yg baik	Senior sbg sumber nama cagub	Kebebasan memilih dlm pilgub	Ketaatan pada kiai	Kiai yg diikuti	Yg paling layak jadi cagub
	Makna mengikuti pilgub	Masyarakat sbg sumber nama cagub		Besar pengaruh kiai	Yg diikuti selain kiai	Yg paling layak jadi cawagub

<sup>20</sup> Counsuelo G. Sevilla *et. al.*, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71-76. Masri Singarimbun, "Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), *Metode Penelitian Suvai* (Jakarta: LPES, 1989), hlm. 3.

		Teman sbg sumber nama cagub				
		Orang tua sbg sumber nama cagub				

### 3.3. Populasi dan Sampling

Sasaran (populasi) penelitian ini adalah masyarakat pesantren terdiri dari kiai, ustadz/santri senior, santri yunior yang sudah berumur 17 tahun, dan alumni pesantren di Jawa Timur.

Tabel.2

#### POPULASI PESANTREN DI JAWA TIMUR THN. 2008/2009

No.	Kabupaten	Jumlah	No.	Kabupaten	Jumlah
01	Pacitan	8	21	Ngawi	124
02	Ponorogo	59	22	Bojonegoro	158
03	Trenggalek	60	23	Tuban	175
04	Tulungagung	90	24	Lamongan	251
05	Blitar	55	25	Gresik	80
06	Kediri	220	26	Bangkalan	171
07	Malang	257	27	Sampang	275
08	Lumajang	217	28	Pamekasan	231
09	Jember	308	29	Sumenep	238
10	Banyuwangi	187	Kota		
11	Bondowoso	184	30	Kediri	29
12	Situbondo	160	31	Blitar	21
13	Probolinggo	286	32	Malang	44
14	Pasuruan	200	33	Pasuruan	27
15	Sidoarjo	208	34	Mojokerto	10
16	Mojokerto	161	35	Madiun	15
17	Jombang	89	36	Surabaya	123
18	Nganjuk	109	37	Probolinggo	47
19	Madiun	80	38	Batu	25
20	Magetan	43			
Jumlah Total					5069

Sumber: Bagian Perencanaan dan Data, Setditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama

R.I

Penetapan sampel kajian perilaku politik masyarakat pesantren ini menggunakan teknik *primary sampling unit*, dan lebih lanjut dipilih secara *purposive* berdasarkan representativitas wilayah geo-kultural. Dari sini terpilihlah Pasuruan mewakili wilayah

Tapal Kuda, Jombang mewakili Mataraman Pedalaman, dan Lamongan mewakili Mataraman Pesisir.

Tabel.3

SAMPEL KAJIAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PESANTREN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR) JAWA TIMUR

No.	Kabupaten	Pesantren	Unit analisis	Jumlah	Total
01	Pasuruan	Al Yasini Areng- Areng	Kiai/Bu Nyai	2	40
			Ustadz/ustadzah	5/5	
			Santriawan/santriwati	10/10	
			Alumni	8	
		Sidogiri	Kiai/Bu Nyai	2	50
			Ustadz/ustadzah	6/6/	
			Santriawan/santriwati	15/15	
			Alumni	6	
02	Jombang	Tebuireng	Kiai/Bu Nyai	2	50
			Ustadz/ustadzah	6/6/	
			Santriawan/santriwati	15/15	
			Kiai/Bu Nyai	3	
		Tambak Beras	Ustadz/ustadzah	6/6/	50
			Santriawan/santriwati	15/15	
			Alumni	5	
03	Lamongan	Sunan Drajat	Kiai/Bu Nyai	2	50
			Ustadz/ustadzah	6/6/	
			Santriawan/santriwati	15/15	
			Alumni	6	
		Al- Fattah	Kiai/Bu Nyai	2	40
			Ustadz/ustadzah	5/5	
			Santriawan/santriwati	10/10	
			Alumni	8	
	TOTAL				380

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan survey lapangan di mana data digali secara langsung dari lokasi penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi secara langsung.

Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur melalui angket (kuesioner). Wawancara yang dimaksud yaitu mengadakan tanya jawab dengan para responden guna mendapatkan gambaran atau informasi secara langsung dengan menggunakan *kuesioner*. Tipe *kuesioner*nya berbentuk semi tertutup, dimana di samping responden hanya boleh menjawab jawaban tertentu yang tertera dalam *kuesioner*, pada item (*kuesioner*) tertentu responden berhak memberikan jawabann sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Tipe pertanyaan (*kuesioner*) tertutup adalah

pertanyaan yang variasi jawabannya sudah ditentukan dan disusun terlebih dahulu, sehingga responden tidak mempunyai kebebasan untuk memilih jawaban kecuali yang sudah diberikan.<sup>21</sup>

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini disesuaikan dengan permasalahan, hipotesis, dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rata-rata, persentase, simpangan baku, dan analisis faktor. Semua proses analisis data menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sains*) for Windows Versi 16.

#### 3.5.1 Analisis Rata-Rata

Analisis rata-rata digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai sifat-sifat kelompok (Borg & Gall, 1990). Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui peringkat skor rata-rata masing-masing variabel penelitian. Rumus yang digunakan untuk analisis rata-rata yaitu sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan:

X = Skor rata-rata

x = Jumlah skor butir

N = Jumlah sampel

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 220.

### 3.5.2 Analisis Persentase

Analisis persentase digunakan untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel penelitian. Untuk mengukur persentase akan diawali dengan menghitung terlebih dahulu lebar interval setiap kategori dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Lebar interval} = \frac{\text{Nilai skor terbesar} - \text{skor terkecil}}{\text{Jumlah kelas interval}}$$

Prosedur selanjutnya adalah menghitung frekuensi sampel pada setiap kategori masing-masing variabel. Berdasarkan data frekuensi ini persentase sampel setiap kategori dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{f}{N}$$

Keterangan:

% = Persentase

f = Frekuensi dalam satu kategori

N = Jumlah keseluruhan kasus dalam distribusi

### 3.5.3 Analisis Faktor

Analisis faktor adalah merupakan teknik statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam jumlah tertentu yang dapat mewakili seperangkat variabel yang banyak (Hasan, 2005). Adapun persamaan analisis faktor (multivariat) adalah sebagai berikut:

$$Y' = W_1.X_1 + W_2.X_2 + W_3.X_3 + \dots + W_n.X_n$$

Keterangan:

$W_n$  = Hasil Proses Multivariat

$X_n$  = Variabel atau Kategori yang Ditentukan oleh Peneliti



Persamaan tersebut merupakan adaptasi dari persamaan regresi linier ganda sebagai salah satu komponen multivariat. Adapun persamaan regresi linier ganda adalah sebagai berikut:  $Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots b_n X_n$

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **4.1 Pendahuluan**

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil data survey dan analisisnya terhadap 8 pesantren yang ada di tiga kabupaten yang tersebar Jawa Timur, yakni pondok pesantren Sidogiri dan Areng-areng (Pasuruan), pondok pesantren Tebuireng dan Tambakberas (Jombang), serta pondok pesantren Sunan Drajat dan At-Fattah (Lamongan).

Dari 280 kuesioner yang disebarkan kepada unsur kyai, bu nyai, santri (pelajar), ustadz, dan alumni, hanya 1 yang tidak kembali. Jadi ada 279 kuesioner yang masuk kepada peneliti dan tidak satu pun yang rusak. Dalam melihat perilaku politik masyarakat pesantren, penelitian ini membuat ngembangkan Ada 3 indikator, yakni ketertarikan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim, preferensi dan pengetahuan Cagub dan Cawagub Jatim, serta sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di kalangan masyarakat pesantren.

Data yang masuk dari survey dianalisis menggunakan analisis prosentase dengan menggunakan SPSS.

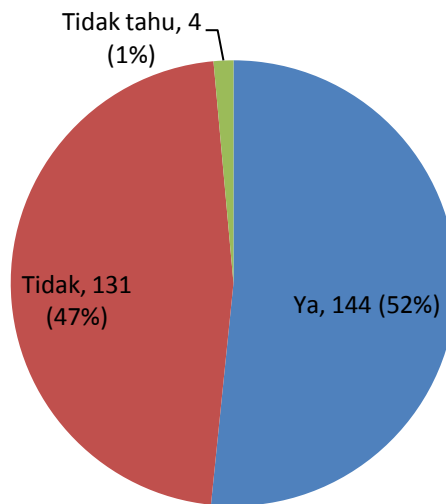
#### **4.2 Analisis Data**

##### *4.2.1 Ketertarikan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jatim*

Penyelenggaraan pesta demokrasi di propinsi Jawa Timur yang rencananya diselenggarakan pada 29 Agustus 2013 nanti tampaknya disambut dengan baik oleh masyarakat pesantren di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh data mayoritas responden para santri, alumni, ustadz, serta pengasuh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang berusaha dan mengikuti informasi tentang *gawe* demokrasi Propinsi Jawa Timur mendatang.

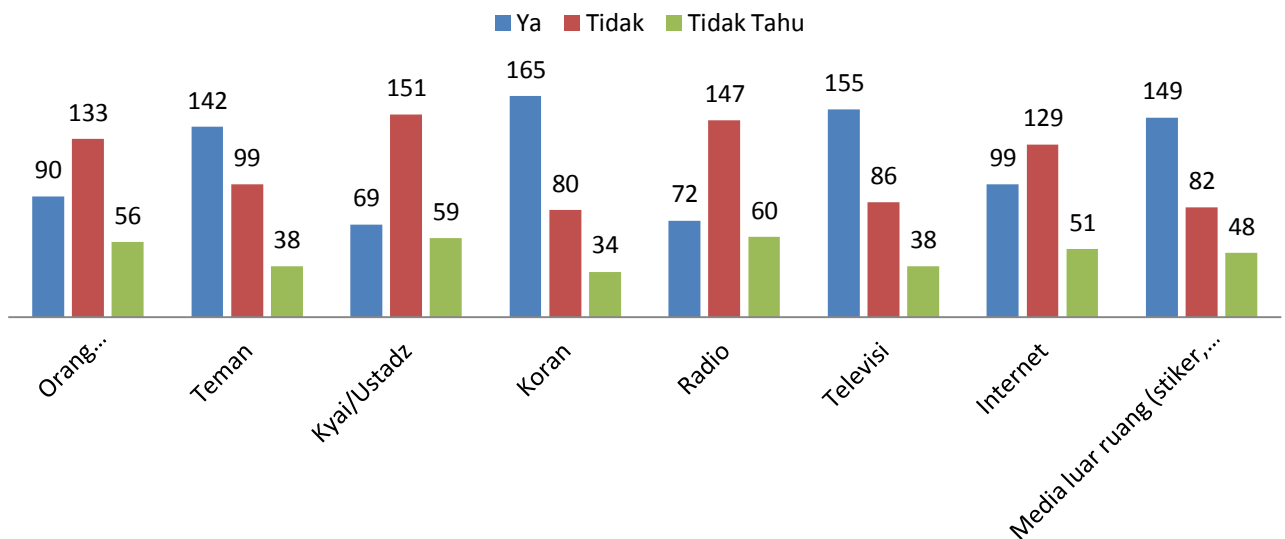
Hasil survei yang diselenggarakan selama tiga bulan pada Maret-Juli 2013 lalu menyatakan bahwa lebih dari separuh responden (144/52%) mengaku tertarik dan berusaha mencari informasi tentang Pilgub, baik melalui media massa, teman, kerabat maupun ustadz. Hanya 131 responden (47%) yang mengaku tidak mencari informasi tersebut, dan hanya 4 orang (1%) saja yang menyatakan tidak tahu (lihat grafik4.1).

Grafik 4.1  
Ketertarikan pada berita/informasi tentang Pilgub



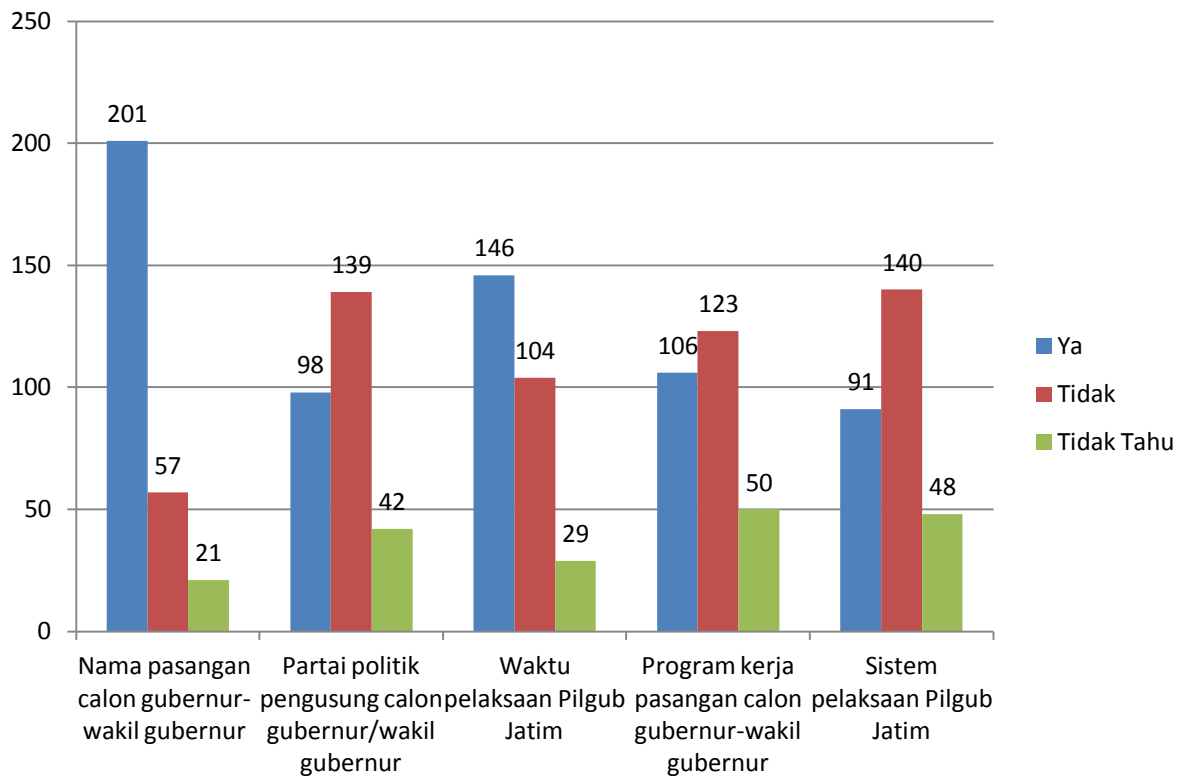
Dalam mengakses informasi Pilgub Jatim 2013, kalangan pesantren kebanyakan lebih suka menggunakan media cetak (165) dibandingkan dengan jenis media lainnya, TV (155), media luar ruangan (149) dan teman (142). Menariknya sebagian mereka juga mengandalkan informasi Pilgub dari ustadz dan kyai (69).

Grafik 4.2.  
Sumber Informasi

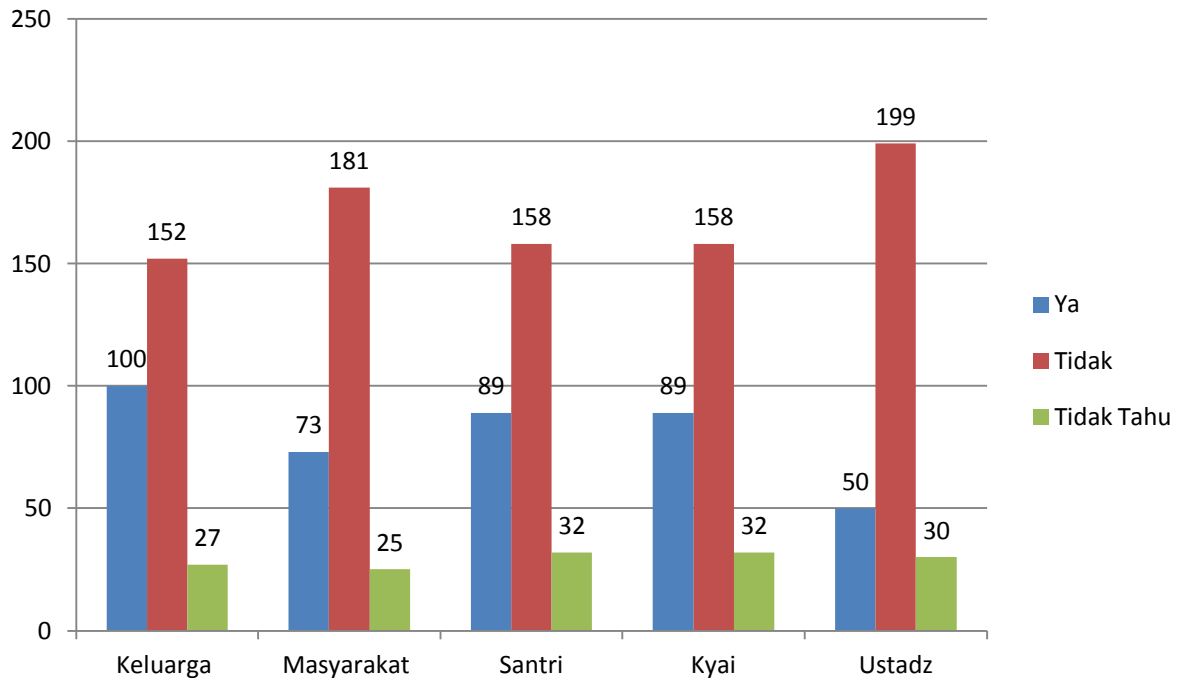


Terkait dengan jenis informasi yang mereka akses dari berbagai sumber tersebut mayoritas responden menyatakan untuk mendapatkan info tentang pasangan calon gubernur dan calon gubernur.(201 responden), disusul dengan pengetahuan tentang waktu pelaksanaan Pilgub Jatim(146) serta program kerja pasangan yang mencalonkan diri. Sebaliknya, mereka tidak banyak menggunakan berbagai media tersebut untuk mengetahui perihal secara berurutan partai politik pengusung pasangan Cagub dan Cawagub (98) dan system pelaksanaan Pilgub (lihat grafik 4.3). Namun demikian, mayoritas komunitas pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini, tidak mendiskusikan dengan kolega, keluarga maupun masyarakat sekitar (Lihat grafik 4.4).

Grafik 4.3  
Jenis Informasi yang Dicari



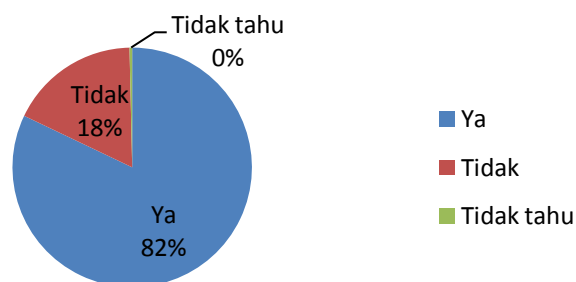
Grafik 4.4  
Diskusi Dengan Kolega dan Keluarga



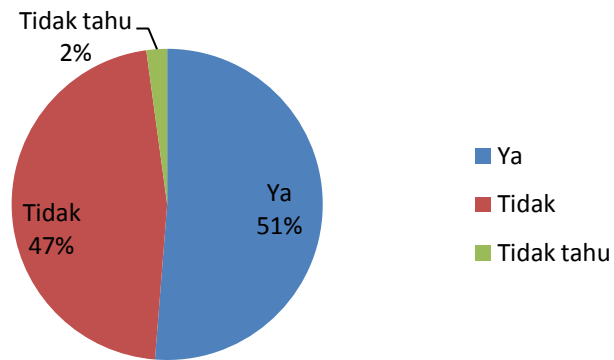
#### 4.2.2 Pengetahuan & Preferensi Cagub-Cawagub Jatim 2013

Menyangkut pengetahuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) Jawa Timur yang bakal dilaksanakan pada 2013 ini mendatang cukup tersosialisasikan dengan baik di kalangan pesantren. sekitar 83% responden mengaku mengetahui waktu pelaksanaan *gawe* demokrasi propinsi Jawa Timur tersebut. Hanya 18% saja yang mengatakan tidak tahu hal tersebut. (lihat grafik 4.5). Sayangnya jumlah dan prosentase sedikit menurun ketika mereka ditanya perihal kapan tepatnya (29 Agustus) Pilgub Jatim. Sebanyak 51% yang mengaku tahu dan 47% dari responden menyatakan tidak tahu (lihat grafik 4.6).

Grafik 4.5  
Pengetahuan Pelaksanaan Pilgub Jatim

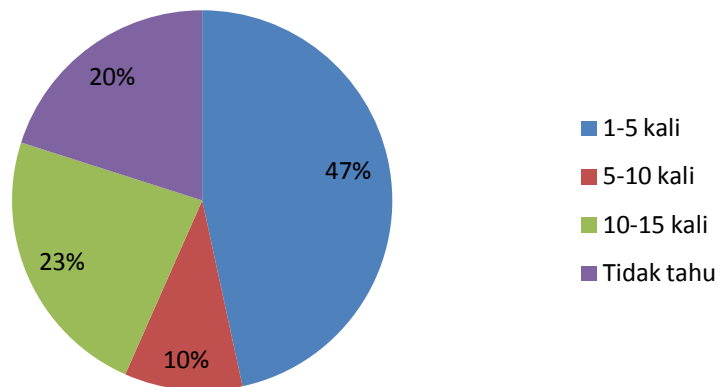


Grafik 4.6.  
Pengetahuan Tanggal Pelaksanaan Pilgub

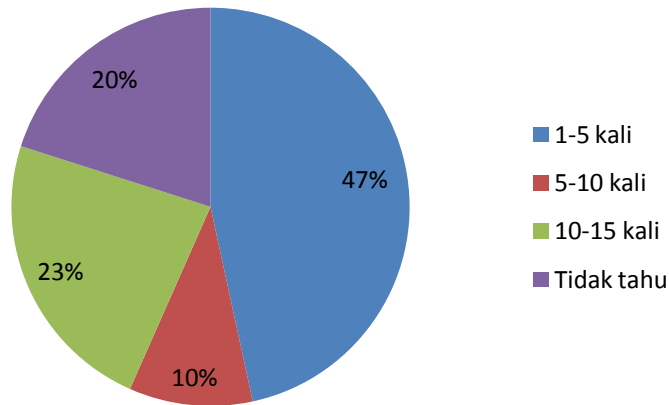


Dalam kurun bulan Juni 2013, para responden mengaku bahwa kebanyakan mereka mendengar, melihat atau membaca informasi perihal Pilgub Jatim antara 1-5 kali. Hal tersebut mereka dapatkan dari Koran, TV, kerabat, kyai, dan ustadz (lihat grafik 4.7, 4.8. 4.9)

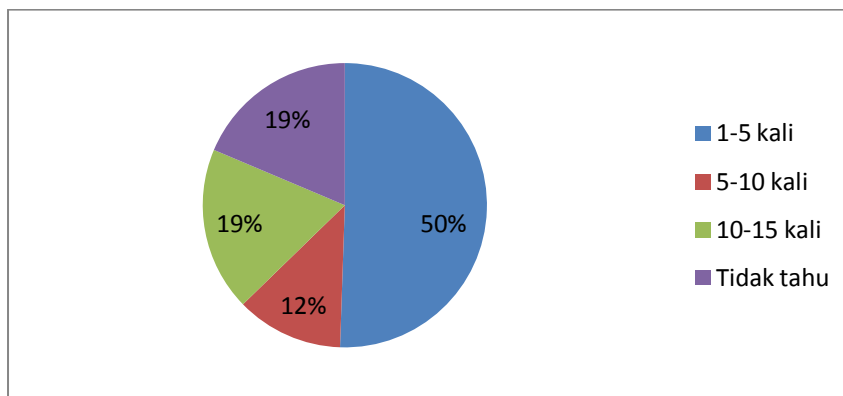
Grafik 4.7  
Intensitas Membaca/Mendengar Informasi dari Media Massa



Grafik 4.8  
Intensitas Membaca/Mendengar Informasi dari Kyai/ustadz

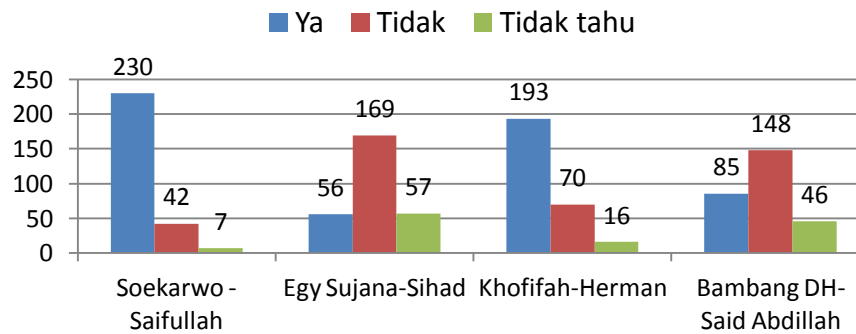


Grafik 4.9  
Intensitas Membaca/Mendengar Informasi dari Kerabat



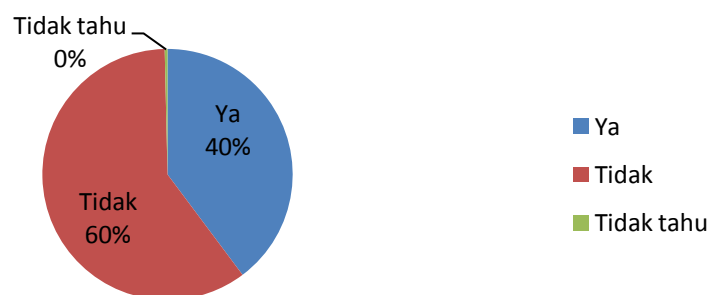
Adapun dengan popularitas para pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jatim 2013, KARSA (Soekarwo-Saifullah Yusuf ) jauh lebih unggul dibanding dengan pasangan calon lainnya, yakni dikenal oleh 230 responden (41%), kemudian disusul oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja sebanyak 193 responden (34%), kemudian pasangan Bambang DH- Said Abdillah yang populer di hadapan 85 responden (15%), dan terakhir pasangan. Egy Sujana-Sihad dikenal oleh 56 responden (10%) (lihat grafik 4.10).

Grafik 4.10  
Popularitas Pasangan Cagub-Cawagub



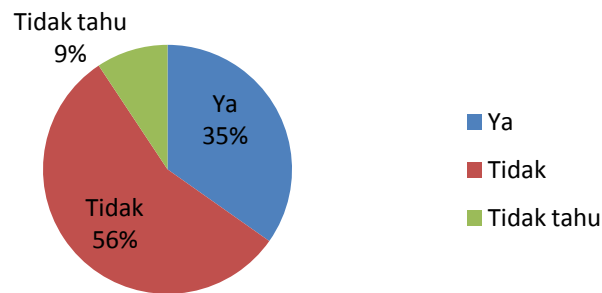
Adapun tentang pengetahuan kaum santri atas latarbelakang partai poliik pengusung pasangan Cagub-Cawagub Jatim 2013, mereka kebanyakan mengaku tidak tahu, yakni 60%, sedangkan tahu sebanyak 40% (lihat grafik 4.11). Lebih dari itu, mayoritas menegaskan bahwa saat pencobosan berlangsung, mereka tidak akan memilih gubernur dan wakilnya atas dasar patai politik yang mengusungnya, yakni 56%, sedangkan yang memilih atas dasar partai politik pengusung adalah 35%(lihat grafik 4.12). Apakah Anda tahu partai politik pengusung pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur 2013?

Grafik 4.11  
Pengetahuan Santri atas Parpol Pengusung Cagub-Cawagub





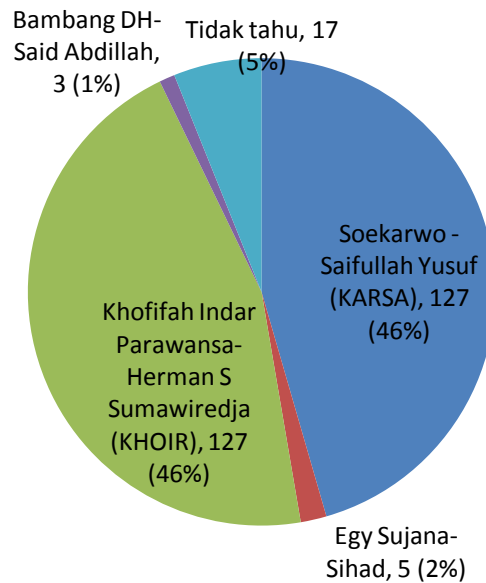
Grafik 4.12  
Penentuan Sikap Politik Atas Dasar Parpol Pengusung Cagub-Cawagub



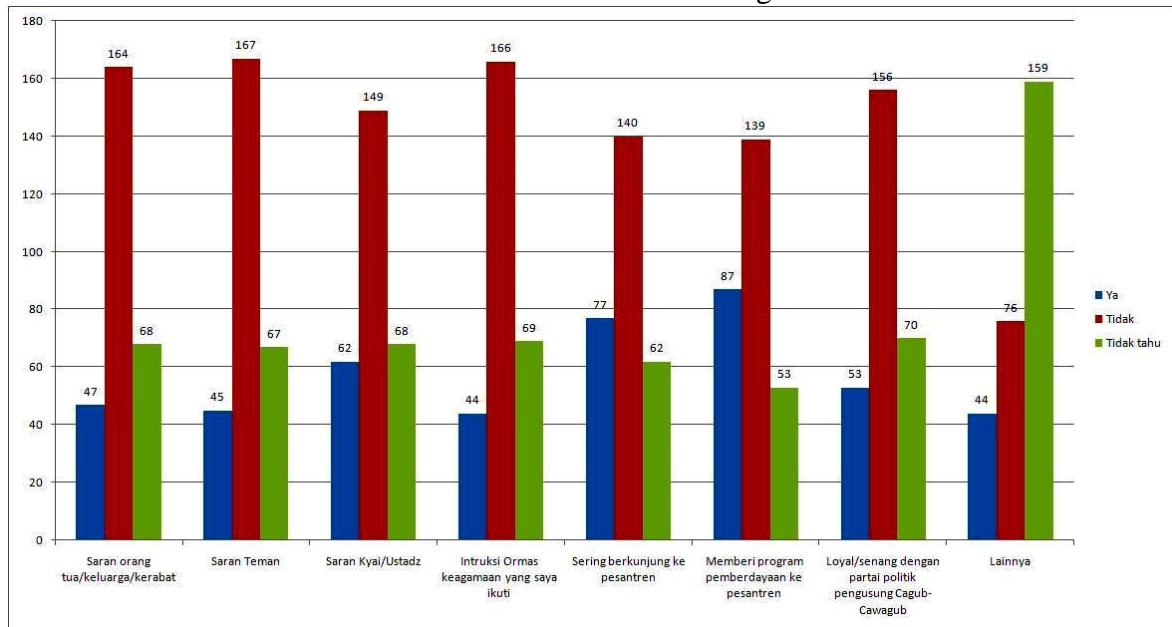
Namun demikian, dari hasil survey ini, ternyata popularitas pasangan Cagub-Cawagub tidak selalu linier sikap politik para pemilih santri di pondok pesantren. Buktinya, meski KARSA sangat populer dari dari lainnya, namun tingkat elektabilitas KARSA (Pak Karwo-Gus Ipul) sama persis dengan KHOIR (Khofifah-Suherman). Kedua pasangan tersebut sama-sama dipilih oleh 127 respon (46%). Sedangkan pasangan Bambang DH-Said A hanya dipilih 3 responden (1%), dan sisanya 17 responden tidak menyatakan pilihannya (5%). (lihat grafik 4.13).

Sedangkan rasional pilihan mereka terhadap nama-nama calon gubernur yang muncul tersebut mayoritas karena para calon kepala daerah tersebut sering memberikan program pemberdayaan (87 responden), berkunjung ke pesantren (77 responden) dan saran kyai/ustadz (62 responden). Kemudian disusul dengan alasan loyalitas kepada partai politik (53 responden). Adapun rasional atas dasar saran teman, keluarga dan lainnya di bawah 50 responden (lihat grafik 4.14).

Grafik 4.13  
Elektabilitas Pasangan Cagub-Cawagub



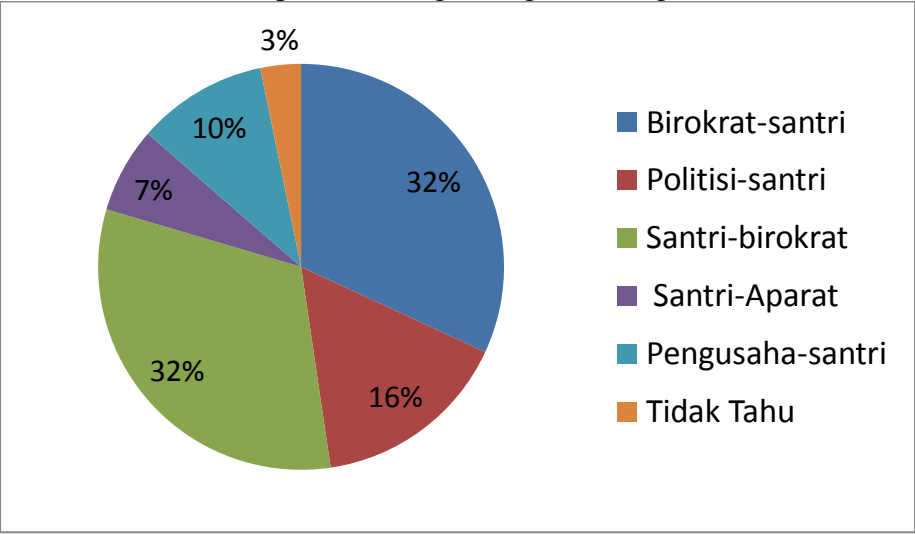
Grafik 4.14  
Alasan Memilih Cawub-Cawagub



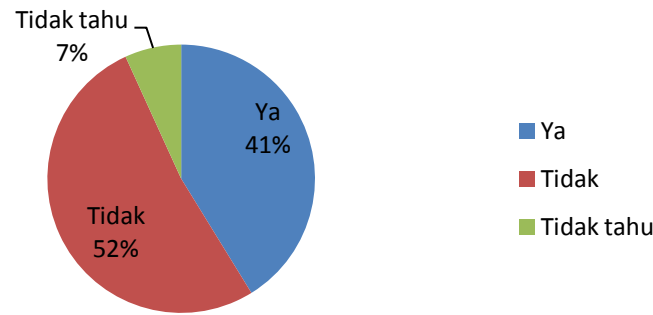
Selanjutnya, ketika para responden ditanya soal komposisi pasangan Cagub-Cawagub ideal yang mereka inginkan pada 2013 nanti, kebanyakan mengaku gabungan birokrat-santri (32%) atau santri-birokrat (32%). Sedangkan politisi-santri, pengusaha santri jauh dari pilihan ideal mereka (lihat grafik 4.15).

Adapun dari perspektif gender., hasil survei menunjukkan bahwa para santri berpendapat bahwa gubernur laki-laki maupun perempuan sama-sama kompeten (159 responden). Namun demikian, jika mereka diminta untuk memilih diantara keduanya, mereka lebih mengidealkan gubernur laki-laki (158 responden) ketimbang gubernur perempuan (41 responden). (lihat grafik 4.16,4.17.4.18).

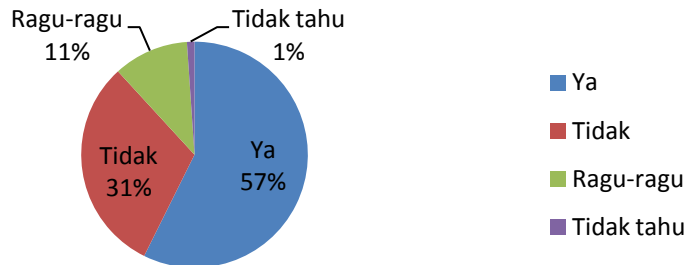
Grafik 4.15  
Komposisi Pasangan Cagub-Cawagub



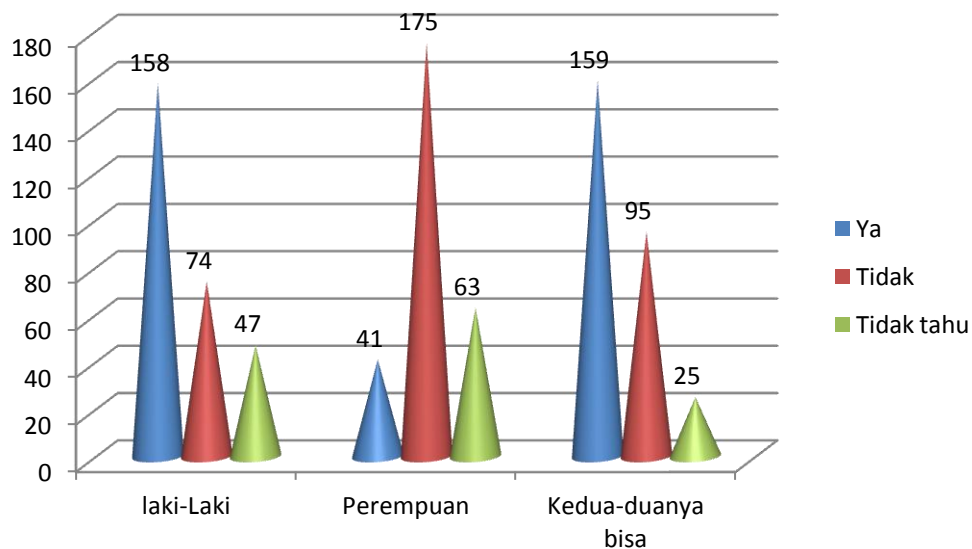
Grafik 4.16  
Gubernur Laki-laki



Grafik 4.17  
Gubernur Perempuan



Grafik 4.18  
Kompetensi Calon Gubernur Berdasar Gender



#### 4.2.3 Sosialisasi Pilgub di Pesantren

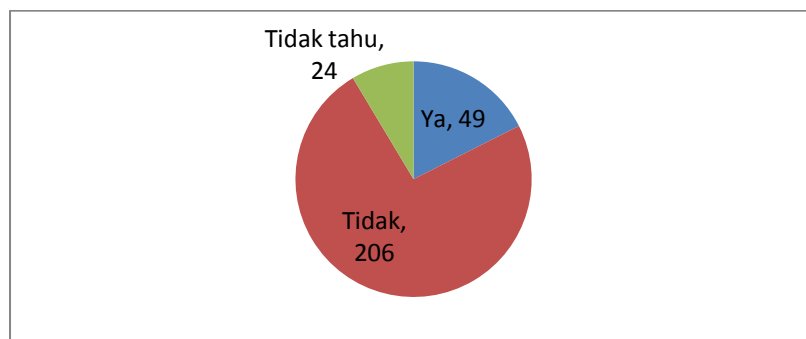
Meski sejumlah pakar budaya menyatakan bahwa peran kyai. dalam pesantren dalam masyarakat sebagai *cultural broker* cukup penting, namun tidak demikian dalam hal sosialisasi politik, khususnya terkait dengan pilihan politik komunitasnya. Pasalnya, hasil survey ini menyatakan bahwa para kyai/pimpinan/ustadz pondok pesantren kebanyakan tidak menginformasikan perihal Pilgub kepada santri (74%/206 responden), dan hanya 17% (49 responden), sedangkan 24 responden mengaku tidak tahu (lihat grafik 4.19). Dari sejumlah petinggi pesantren yang pro-aktif melakukan sosialisasi Pilgub

Jatim di lingkungannya adalah unsur ustadz/guru (42%), sedangkan unsur kyai/bu nyai hanya 9% (lihat grafik 4.20).

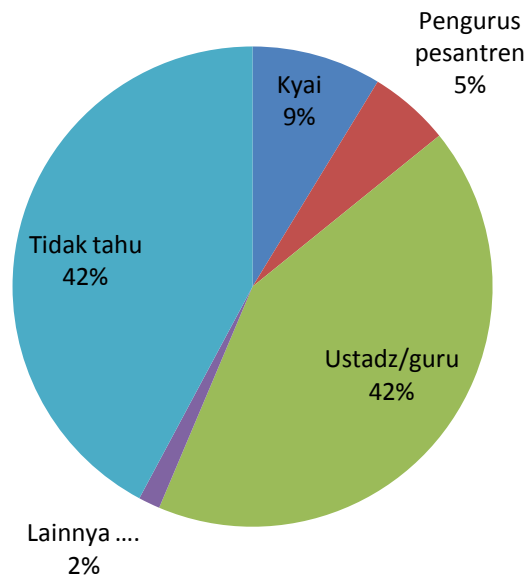
Sejalan dengan hal tersebut, para santri dan alumni juga mengaku bahwa mayoritas kyai/pimpinan/ustadz mereka tidak pernah menginstruksikan untuk datang mencoblos ke tempat pemungutan suara (76%) (lihat grafik 4.21), termasuk mengarahkan untuk penyoblos sangan Cagub-Cawagub tertentu (78%) (lihat grafik 4.22). Hanya 14% dari responden yang menegaskan bahwa unsur kyai/ustadz pernah mengarahkan untuk menyoblos calon gubernur tertentu (lihat grafik 4.23). Adapun nama-nama pasangan yang paling banyak disarankan untuk dipilih dalam Pilgub 2013 nanti duet BERKAH (46%), disusul oleh KARSA (8%), BERES (2%), sisanya tidak menjawab (44%) (lihat grafik 4.24).

Kondisi serupa juga tergambar ketika para responden ditanya soal instruksi Ormas Keagamaan untuk mencoblos pasangan Cagub-Cawagub tertentu pada Agustus 2013 nanti. Lebih 45% responden mengaku diarahkan untuk memilih pasangan BERKAH ketimbang lainnya (lihat grafik 4.25). Namun demikian, komunitas pesantren yang ada di Jawa Timur belum menyatakan dengan tegas sikapnya apa menuruti instruksi Ormas kegamaan yang diikutinya atau tidak (79%), hanya 19% yang sudah menegaskan sikapnya, yakni yang melaksanakan instruksi Ormas yang diikutinya 12%, dan yang tidak mengikuti 9%. (lihat grafik 4.26).

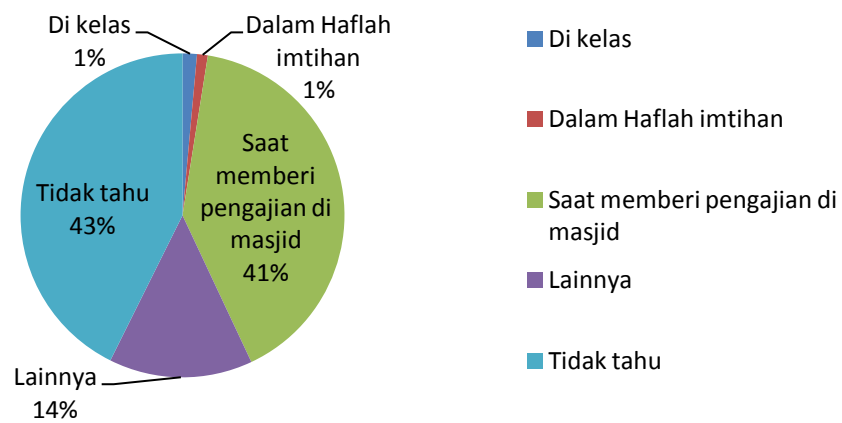
Grafik 4.19  
Intensitas Kyai/Ustadz Mensosialisasikan Pilgub di Pesantren



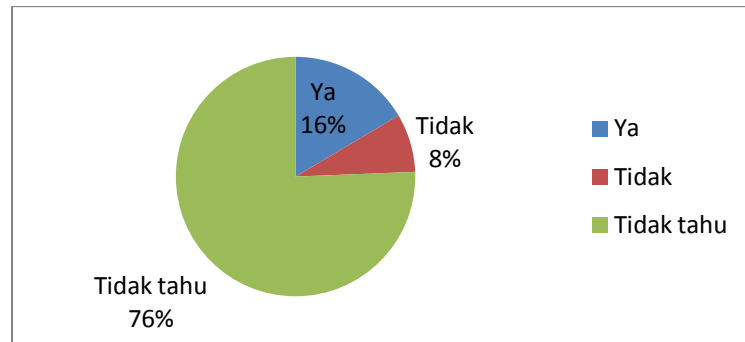
Grafik 4.20  
Informan Pilgub di Pesantren



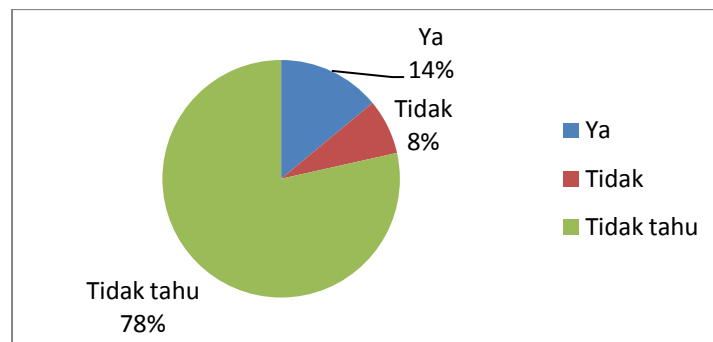
Grafik 4.21  
Momentum Sosialisasi Pilgub di Pesantren



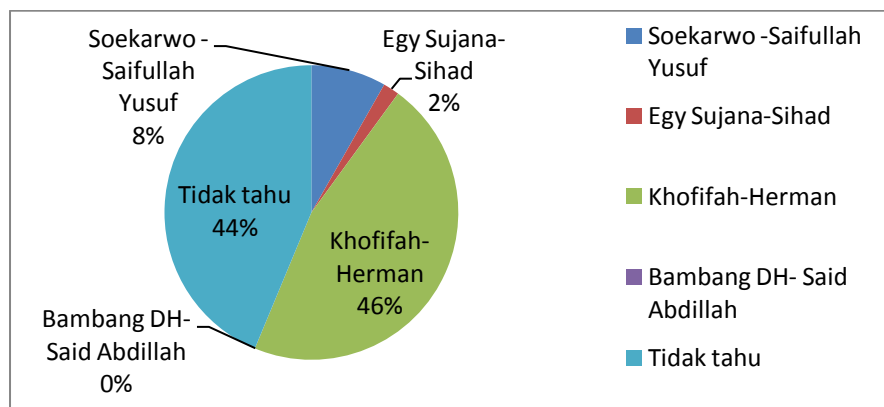
Grafik 4.22  
Pengarahan untuk ke TPS



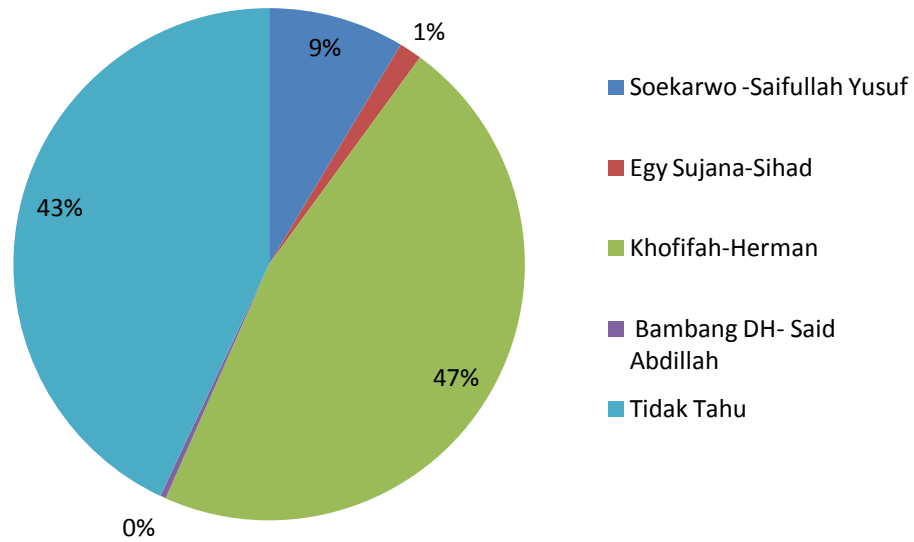
Grafik 4.23  
Pengarahan untuk Mencoblos Pasangan Cagub-Cawagub



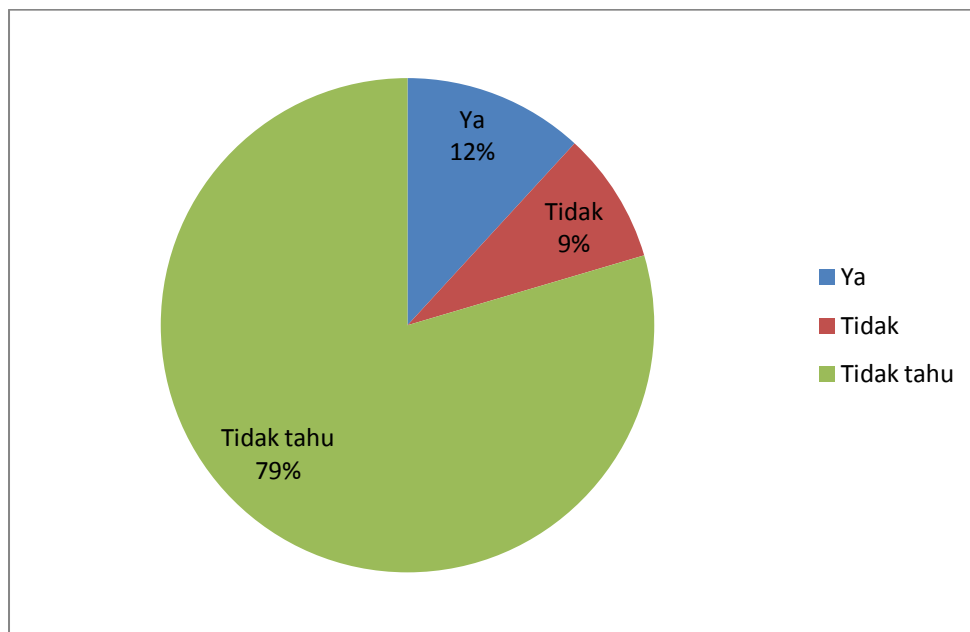
Grafik 4.24  
Nama Pasangan Cagub-Cawagub yang Diarahkan



Grafik 4.25  
Nama Pasangan atas Arahan Ormas



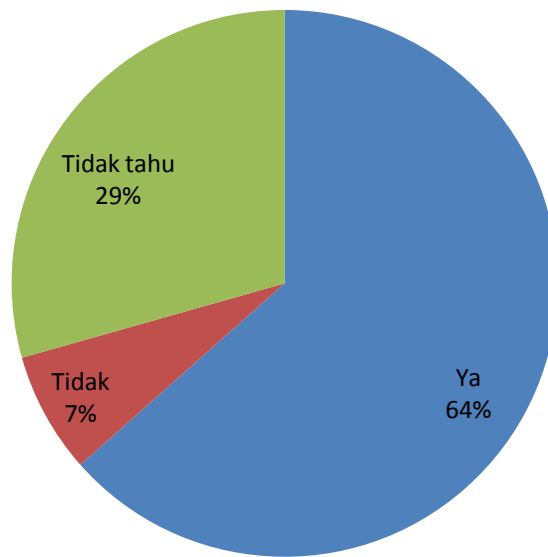
Grafik 4.26  
Pengaruh Ormas dalam Sikap Politik Santri





Yang cukup membanggakan, mayoritas santri di pesantren di Jawa Timur dalam survey ini menegaskan akan berpartisipasi untuk datang dan mencoblos ke TPS saat Pilgub 2013 dilaksanakan (64%), meskipun 29% di antara mereka mengaku belum menentukan sikap, dan 7% lainnya Golput (lihat grafik 4.27).

Grafik 4.27  
Kesanggupan Mencoblos



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Agenda pemilihan gubernur Jawa Timur 2013 merupakan momentum untuk krusial untuk menentukan nasib pembangunan masyarakat setempat sekaligus sebagai momentum untuk melakukan pendidikan politik yang demokratis bagi warga. Oleh karena itu, kajian eksploratif terhadap perilaku politik masyarakat pesantren yang dilakukan secara obyektif merupakan sesuatu yang cukup penting untuk melakukan pendidikan politik ke depan, selain untuk menentkan program pemberdayaan pesntren. Dari survey ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Terkait dengan tingkat ketertarikan masyarakat pesantren terhadap pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, secara umum mereka sangat antusias jika dilihat dari usaha mereka yang kerap mencari informasi perihal tersebut dari berbagai sumber. 52% dari respon mengaku berusaha mencari informasi tentang Pilgub, baik melalui media massa, teman, kerabat maupun ustadz. Sedangkan 47% dari mereka bersikap pasif terkait dengan hal ini.
- 5.1.2. Media cetak masih menjadi media utama bagi para santri untuk mengakses informasi-informasi pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur dibanding dengan media elektronik, media *out-door*, ataupun *opinion leader* atau pemuka masyarakat (kyai/ustadz).
- 5.1.3. Masyarakat pesantren tampak sudah cukup terdidik dalam hal politik. Dalam kasus Pemilukada Jawa Timur, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum santri kebanyakan tidak sekadar mencari informasi tentang nama pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jatim ke depan, namun lebih dari itu mereka juga mencari informasi tentang program kerja masing-masing calon. Selain

itu, mereka juga mengakses waktu pelaksanaan dan sistemPemilukada yang diberlakukan pada 2013 ini. Sayangnya,hingga awal Juli 2013 ini, mereka belum banyak yang tahu tentang detil pelaksanaan Pemilukada Jatim, yakni 47% responden.

- 5.1.4. Para santri ternyata lebih mengenal pasangan calon gubernur-wakil gubernur calon yang bersal dari komunitas, baik berkomposisi birokrat-santri atau pun santri birokrat. Pasangan soekarwo-Saifullah Yusuf (41%) lebih populer dari Khofifah-Suherman (34%), , dan Bambang DH-Said (15%), dan Egy Sujana-Sihad (10%).
- 5.1.5. Partai politik pengusung bukanlah faktor penting bagi penentuan pilihan politik “kaum sarungan” ini. Mereka mayoritas tidak tahu latarbelakang partai politik pengusung pasangan Cagub-Cawagub Jatim 2013 (60%),dan tidak memilih pemimpinnya atas dasar latar belakang politik yang mengusungnya (56%). Bagi mereka calon gubernur ideal adalah yang sering memberi program pemberdayaan dan berkunjung ke pesantren. Saran kyai/ustadz pun bukan menjadi faktor dominan bagi para santri dalam menentukan pilihan politik.
- 5.1.6. Tingkat elektabilitas KARSA (Pak Karwo-Gus Ipul) sama persis dengan BERKAH (Khofifah-Suherman). Kedua pasangan tersebut sama-sama dipilih oleh 127 respon (46%). Sedangkan pasangan BANGSA (Bambang-Said) hanya dipilih 3 responden (1%), dan sisanya 17 responden tidak menyatakan pilihannya (5%).
- 5.1.7. Mayoritas santri di Jawa Timur dalam survey ini menegaskan akan berpartisipasi untuk datang dan mencoblos ke TPS saat Pilgub 2013

dilaksanakan (64%), sedangkan 29% di antara mereka mengaku belum menentukan sikap, dan 7% tidak mencoblos.

5.1.8. Konfigurasi perilaku politik kaum santri digolongkan menjadi dua, yakni kelompok rasional dan tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok rasional lebih dominan dibanding tradisional., sebab sikap politik mayoritas mereka ditentukan oleh program kerja calon kepala daerah bukan atas saran organisasi pendukung atau kyai. Selain itu, kebanyakan mereka tidak bias gender dalam menentukan pilihan politik, serta kesadaran mereka dalam berpartisipasi PemiluKada untuk proses demokrasi.

## **5.2. Rekomendasi**

Dari kesimpulan di atas, setidaknya kajian ini memberikan beberapa rekomendasi demi pemberdayaan masyarakat pesantren dalam berdemokrasi, serta penyelenggara PemiluKada Jawa Timur sebagai berikut:

5.2.1. Untuk kesuksesan dan efektifitas PemiluKada Jawa Timur, pihak pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, perlu melakukan sosialisasi proses pelaksanaan dan program kerja masing-masing pasangan kepada masyarakat santri melalui media massa (cetak dan elektronik), mengingat mayoritas kaum santri masih menjadi media massa tersebut sebagai media utama.

5.2.2. Pihak pihak pesantren perlu bekerja sama dengan Pemprov dan KPU untuk melakukan pemberdayaan politik kaum pesantren demi mendewasakan mereka dalam berpolitik serta mampu berpolitik lebih cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, H.W. 1973, "The religion of Java: A commentary", in *Reading on Islam in South Asia*, eds A. Ibrahim, S. Siddique & Y. Hussain, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982, "*Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*", LP3ES,
- Feillard, Andree.1999, "*NU vis a vis Negara*," Lkis, Yogyakarta
- Geertz, Clifford. 1983, "*Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*", Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hiroko dan Horikoshi. 1987, *Kiai dan Perubahan Sosial*", P3M, Jakarta
- Mastuhu. 1994, "*Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*", INIS, Jakarta
- Martin van Bruissen. 1995, "*Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*," Mizan, Bandung.
- . 1994, "*NU: tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru*", LKiS, Yogyakarta.
- Mujani, Saiful and R. William Liddle. 2003. "*Islamism in Democratic Indonesia: Findings of a New Survey*." American Political Science Review
- Mulkhan, Abdul, Munir. 1992, "*Runtuhnya Politik Santri*," Rinneka SIPRESS, Yogyakarta.
- Nie, Norman H., Sidney Verba, Jae-on Kim. 1974. "*Political Participation and the Life Cycle*" Comparative Politics,
- Sevilla, Counsuelo G, et. al. 1993, "*Pengantar Metode Penelitian*", UI Press, Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1989, "Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), *Metode Penelitian Suvai*, LPES, Jakarta.
- Verba, Sidney, et al. 1995. "*Beyond SES: A Resource Model of Political Participation*."
- Verba, Sidney, Norman H. Nie, and Jae-On Kim. 1978. "*Participation and Political Equality*", Cambridge University Press, Cambridge.
- Wald, Kenneth D. 1992. "*Religion and Politics in the United States*", Congressional Quarterly Press, Washington, DC.